

SEMANGAT TAMAN SISWA DAN PERLAWANANNYA TERHADAP UNDANG-UNDANG SEKOLAH LIAR

DWI PURWOKO

Taman Siswa

ABSTRACT Taman Siswa as one of the private educational institutions was founded by Suwardi Suryaningrat or Ki Hadjar Dewantoro to promote national education. To curb its widespread activities the Dutch Colonial Government decreed an ordinance declaring Taman Siswa as illegal. The reaction to this fact did not come only from Suryadi and his followers but also from other national activists. Considering the political situation at that time which was becoming more critical the colonial government lifted the ordinance in 1933.

Pendahuluan

Kurun waktu tahun 1908-1942 merupakan perioda pergerakan nasional. Pada masa itu, aktivitas organisasi sosial dan politik memikirkan kemerdekaan Indonesia. Aktivitas organisasi sosial dan politik tersebut terdiri atas dua corak. Ada corak yang menggunakan asas perjuangan kooperasi (bekerjasama) dan ada pula corak yang bersikap nonkooperasi (tidak bekerjasama) dengan pemerintah kolonial Belanda.

Untuk menumbuhkembangkan kesadaran akan kemerdekaan, diperlukan pendidikan kebangsaan. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan kalau pada zaman penjajahan, sejalan dengan aktivitas pergerakan nasional pada waktu itu, pendidikan kebangsaan menjadi program dari hampir setiap organisasi sosial dan politik.

Ternyata tidak hanya kaum pergerakan nasional yang melihat pentingnya pendidikan politik, melainkan pemerintah kolonial juga melihat hal

yang demikian. Bruggmans, seorang ilmuwan berkebangsaan Belanda, pernah memberi komentar: *Het onderwijs is een der hoeksteen van het koloniaal beleid* (Pengajaran/pendidikan merupakan salah satu batu kebijaksanaan kolonial) (Lihat juga Abdurrahman Surjomihardjo, 1986:67).

Namun pendidikan yang dikehendaki oleh pemerintah kolonial adalah pendidikan yang menguntungkan baginya. Atau dengan kata lain, pendidikan harus ditujukan untuk mengabdikan kolonialisme Belanda (M. Sidky Daeng Maturu, 1985:9). Oleh karena itu, pendidikan/pengajaran yang cenderung membahayakan dasar kebijaksanaan kolonial akan mendapat reaksi dari pemerintah kolonial Belanda. Sementara itu, bagi kaum pergerakan nasional, pendidikan yang mereka kehendaki adalah pendidikan yang mengandung dasar kebangsaan untuk kemerdekaan.

Berdirinya Taman Siswa

Kondisi politik ketika itu merupakan salah satu pendorong terbentuknya Taman Siswa*), suatu organisasi yang berkecimpung di dalam dunia pendidikan. Taman siswa dibentuk pada tanggal 3 Juli 1922. Taman Siswa berasaskan kebangsaan dan bersikap nonkooperatif terhadap pemerintah jajahan.

Organisasi Taman Siswa yang bergerak di dalam dunia pendidikan ini mengajarkan dasar kemerdekaan. Hal ini terlihat dari Pernyataan Asas Taman Siswa tahun 1922 yang di dalam pasal 1 dan 2 dari Pernyataan Asas tersebut mencantumkan sendi-sendi kemerdekaan. Bila diterapkan kepada pelaksanaan pengajaran/pendidikan hal ini dapat diartikan bahwa murid yang dididik diajak untuk berpikir dan berperasaan serta bekerja dengan merdeka di dalam batas tujuan bersama.

Kedua pasal tersebut berkaitan erat dengan pasal 5 dari Pernyataan Asas Taman Siswa. Pasal 5 ini berisikan asas yang sangat penting bagi semua orang yang ingin mengejar kemerdekaan hidup yang sepenuh-penuhnya.

*) Ada yang berpendapat bahwa krisis ekonomi tahun 1930-an memaksa pemerintah kolonial menekan anggaran belanja pendidikan. Sementara itu tuntutan pendidikan sudah semakin meningkat, sehingga bermunculanlah sekolah-sekolah swasta termasuk Taman Siswa (Lihat juga Aqib Suminto, 1985:61). Namun penulis melihat bahwa pada tahun 1930-an kontrol politik pemerintah sangat keras terhadap kaum pergerakan nasional yang nonkooperasi, sehingga dirasa perlu oleh kaum pergerakan untuk mencurahkan kegiatannya dan salah satunya adalah dalam jalur pendidikan.

Inti dari pasal 5 adalah percaya kepada kekuatan sendiri untuk tumbuh. Dari pernyataan asas tersebut, besar harapan bahwa Taman Siswa dapat memberi pengaruh dalam membentuk kesadaran nasional yang positif di kalangan orang Indonesia (Lihat juga Robert van Niel, 1984:289).

Sifat kebangsaan terlihat jelas dari metoda pendidikan yang diterapkan di Taman Siswa. Salah satu metoda pendidikannya adalah bahwa pendidikan diberikan kepada anak didik untuk menyiapkan rasa kebangsaan dan tanggung jawab, agar anak berkembang merdeka dan menjadi orang yang se-rasi, terikat erat dengan milik kebudayaan sendiri, dan dengan demikian terhindar dari pengaruh yang tidak baik dan tekanan hubungan kolonial, seperti umpamanya rasa rendah diri, ketakutan, kebencian, keseganan, dan tiruan yang membuta.

Metoda pendidikan ini juga mengajarkan agar anak didik mempunyai sikap patriotisme yang tinggi dan mengabdikan kepada bangsanya.^{*)} McKahin melihat bahwa Taman Siswa merupakan institusi yang sangat strategis dalam menanamkan sikap nasionalis kepada para pemuda. Dan ternyata dari keseluruhan inilah lahir para ahli yang cerdas dan para pemimpin dalam berbagai pertumbuhan nasionalis di bidang politik (McKahin, 1980:110).

Obsesi Suwardi

Sebagaimana telah disinggung di atas bahwa pendiri Taman Siswa adalah Suwardi Suryaningrat (Ki Hajar Dewantara). Ia dikenal sebagai *paedagogisch leider* (pemimpin pendidikan). Pada masa pergerakan, Suwardi bersama-sama dengan E.F.E. Douwes Dekker dan Tjiptomangunkusumo pernah dibuang oleh pemerintah kolonial karena dianggap melanggar aturan pers. Hukuman yang menimpa dirinya itu merupakan refleksi dari sikapnya yang ingin merdeka. Sikapnya yang menentang dan keinginannya untuk merdeka sudah tampak sejak ia masih kanak-kanak. Ia suka berkelahi dengan anak-anak Belanda dan menentang adat "sembah" yang berlaku di kalangan bangsawan kraton.

*) Untuk mengefektifkan proses belajar mengajar, Taman Siswa menerapkan "Sistem Among," yang salah satu seginya adalah mewajibkan guru-guru untuk berperan sebagai "pemimpin yang berjalan tetapi mempengaruhi" dengan memberi kesempatan kepada anak didik untuk mengaktualisasikan dirinya sendiri. Inilah yang secara singkat disebut dengan semboyan Tut Wuri Handayani (Lihat Abdurrachman Surjomihardjo, 1986:88).

Ia mulai berkenalan dengan dunia politik sejak ia masih menjadi pelajar sekolah kedokteran (Stovis). Namun ia tidak sempat menyelesaikan studinya di Stovia karena biaya untuk meneruskan pendidikan tersebut sudah habis. Ia kemudian bekerja di suatu pabrik gula di Bojong, Purbalingga. Setelah itu ia beralih profesi menjadi wartawan.

Di dalam dunia kewartawanan inilah ia bertemu dengan E.F.E. Douwes Dekker dan H.O.S. Tjokroaminoto. Selain pers, kegiatan organisasi juga ditekuninya. Ia masuk ke dalam organisasi Sarekat Islam (SI), Budi Utomo (BU), dan Indische Partij (IP). Melalui organisasi IP yang revolusioner, Suwardi meniti karir politiknya. Keradikalan IP ternyata sedikit banyak telah membentuk watak Suwardi Suryaningrat.

Itulah pula yang menyebabkannya menulis artikel di surat kabar sewaktu pemerintah kolonial, pada bulan November 1913, merayakan ulang tahunnya yang ke-100 bagi kemerdekaan Belanda dari penjajahan Perancis-Napoleon. Judul artikelnya adalah: *Als ik een Nerdelands was ...* (Andaikata Aku seorang Belanda ...). Artikel ini menjadi sangat terkenal karena isinya merupakan sindiran yang tajam terhadap ketidakadilan pemerintah kolonial. Artikel ini pulalah yang membawa Suwardi ke Belanda dalam status pembuangan oleh pemerintah kolonial.

Keberaniannya untuk berkorban ditunjukkan dalam kegiatannya yang menyinggung nilai-nilai kebangsawanan. Nilai-nilai kebangsawanan yang telah tertanam di dalam pemikiran Suwardi juga terlihat ketika ia menekankan perlunya penerapan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di sekolah. Obsesi Suwardi ini merupakan sikap politik yang menghendaki integrasi kelompok sosial di dalam masyarakat Indonesia. Menurutnya bahasa Indonesia telah ditentukan untuk menjadi bahasa pergaulan di antara bermacam-macam golongan penduduk di Nusantara. Secara tidak langsung Suwardi menekankan bahwa pengajaran (bahasa Indonesia) seharusnya ditujukan untuk memupuk kesadaran persatuan di antara penduduk Indonesia yang heterogen (Lihat juga Abdurrachman Surjomiharjo, 1986:69).

Di dalam pemikiran Suwardi, ada korelasi di antara organisasi yang dipimpinnya dengan gerakan politik. Ia pernah menegaskan bahwa Taman Siswa dapat digambarkan sebagai ladang atau sawah tempat orang memupuk apa yang perlu bagi keperluan hidupnya. Sedangkan gerakan politik bagaikan pagar yang melindunginya dari gangguan binatang buas yang akan memakan dan menginjak-injak tunas tanaman tersebut. Pendapat Suwardi menunjukkan bahwa Taman Siswa memang tidak langsung terlibat atau ikut campur di dalam politik praktis, tetapi cara perjuangannya berhasil secara horisontal menghimpun segala golongan masyarakat di dalam lingkungan pengaruhnya.

Mereka yang berada di dalam pengaruh Taman Siswa berusaha untuk menghapus sistem kolonial untuk mencapai kemerdekaan (Lihat Abdurachman Surjomihardjo, 1986:150). Secara singkat, dapat dikatakan bahwa Suwardi telah mempunyai obsesi untuk mencapai kemerdekaan melalui jalur pendidikan. Upayanya ini merupakan jalan menuju kemerdekaan tanpa harus berhadapan secara "frontal" dengan pemerintah kolonial Belanda. Dan pada saat itu, Taman Siswa yang dipimpinnya berkembang dengan pesatnya. Pemerintah Belanda pun merasa khawatir terhadap perkembangan organisasi tersebut.

Tampaknya Suwardi telah menghentikan keterlibatan politiknya dengan gerakan nasionalis karena adanya pembatasan yang diberlakukan atas dirinya oleh pemerintah kolonial. Namun ia tetap menentang keunggulan kolonial atas Hindia melalui jalur pendidikan.

Reaksi Pemerintah

Kemajuan Taman Siswa yang begitu cepat menimbulkan rasa waswas di kalangan pemerintah pada "umumnya" dan warganegara Belanda yang berada di Indonesia pada "khususnya.". Oleh karena itu, untuk menghambat kemajuan Taman Siswa, pemerintah kolonial mengeluarkan Undang-Undang Sekolah Liar (*Wilde Scholen Ordonantie*).*) Dalam ordonansi (undang-undang) tersebut, semua sekolah partikelir (swasta) terutama Taman Siswa harus "minta izin" dalam melakukan aktivitasnya.

Adapun secara garis besar isi *Wilde Scholen Ordonantie* dapat dibagi ke dalam empat bagian:

- I. *Tentang guru-guru.* Guru-guru yang akan mengajar harus minta izin terlebih dahulu kepada Hoofd van Gewestelijk Bestuur (Kepala Pemerintahan Daerah).
- II. *Tentang bangunan sekolah.* Bila akan mendirikan sekolah baru, pendiri harus minta izin kepada Hoofd van Gewestelijk Bestuur.

*) Sebenarnya di kalangan pemerintah sendiri terjadi pro dan kontra terhadap diberlakukannya *Wilde Scholen Ordonantie*. Misalnya Schrieke-selaku direktur pendidikan- yang menilai bahwa pemerintah belum perlu mengambil tindakan terhadap sekolah liar. Namun kalangan luas pejabat kolonial menghendaki pengawasan yang lebih ketat terhadap sekolah liar termasuk Taman Siswa (Lihat juga Aqib Suminto, 1984:60).

- III. *Hukuman*. Segala pelanggaran terhadap ordonansi ini, dapat dihukum selama-lamanya 8 hari penjara atau denda sebanyak-banyaknya f.25. Hukuman ini dapat diperberat menjadi selama-lamanya 1 bulan dan denda sebanyak-banyaknya f.200, jikalau dalam waktu itu pelanggaran yang dilakukan oleh satu orang (atau bestuur/pengurus) belum lewat dari dua tahun.
- IV. *Aturan Perubahan*. Guru-guru yang pada tanggal 1 Oktober 1932 sedang memberi pengajaran seperti tersebut dalam ordonansi ini, diwajibkan untuk meminta izin dalam tempo 6 bulan (jadi paling lambat tanggal 31 Maret 1933). Demikian juga dengan kepala sekolah yang harus melapor kepada Hoofd van Gewestelijk Bestuur (Lihat Pitut Soeharto-A. Zaenel Ihsan, 1982:172).

Di dalam kenyatannya baik guru, kepala sekolah, maupun upaya mendirikan sekolah baru, mengalami kesulitan ketika mereka minta izin kepada Hoofd van Gewestelijk Bestuur. Hal ini merupakan upaya pemerintah kolonial untuk mempersulit dan membatasi perkembangan kemajuan Taman Siswa. Perlu diketahui bahwa ordonansi tersebut dikeluarkan secara mendadak dan mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1932. Ordonansi ini tidak sempat dibahas di dalam kongres Taman Siswa. Oleh karena itu dengan dasar wewenang yang diterapkan di dalam Anggaran Dasar Taman Siswa, Suwardi selaku pemimpin Taman Siswa mengambil kebijaksanaan untuk melawan ordonansi itu.

Pemerintah kolonial kemudian melancarkan aksinya dengan menutup dan menyegel Taman Siswa karena dinilai oleh pemerintah tidak mengindahkan ordonansi. Tindakan pemerintah ini ternyata tidak mematikan kegiatan Taman Siswa. Kegiatan belajar dilakukan di rumah masing-masing guru. Bila ada seorang guru yang ditangkap karena aksi yang terang-terangan menentang ordonansi itu, maka dengan suka rela guru yang lainnya menggantikan guru yang ditangkap dan dipenjara itu (Lihat Nyi Hajar Dewantara, 1979: 116).

Tampaknya pemerintah dengan curiga menghadapi sistem pengajaran Taman Siswa pada khususnya dan sekolah partikelir pada umumnya serta khawatir akan pengajaran/pendidikan yang akan "disalahgunakan" dan "dipakai sebagai propaganda politik melawan kekuasaannya." Pengajaran/pendidikan yang dijalankan oleh Taman Siswa tampaknya merupakan dinamit bagi sistem kasta yang dipertahankan dengan keras di dalam daerah jajahan (Education would be dynamite for rigid caste system of colonies), (Lihat juga R. Kennedy, 1974:311). Sedangkan sistem kasta merupakan ciri

khas politik *divide et impera* pemerintah kolonial untuk menguasai kekuatan golongan politik di Indonesia.

Selain ruang gerak Taman Siswa dibatasi, ruang gerak pimpinan Taman Siswa yakni Suwardi juga mendapat rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Pada tahun 1924, pemerintah kolonial menyita peralatan yang berada di rumah Suwardi, termasuk bangku sekolahnya. Perlu diketahui bahwa sebagian besar rumah Suwardi dijadikan kegiatan belajar mengajar (sekolah). Penyitaan rumah Suwardi oleh kolonial dikarenakan Suwardi dianggap tidak membayar pajak. Namun Suwardi mempunyai alasan kuat untuk tidak membayar pajak karena ia tinggal bersama dengan perguruannya (sekolahnya). Menurut taksirannya, ia tidak sampai terkena pajak rumah tangga karena ia hanya menempati dua kamar saja. Sedangkan kamar-kamar lainnya dipakai untuk perguruan. Menurut peraturan dari pemerintah kolonial sendiri kondisi semacam ini tidak wajib untuk membayar pajak. Dengan demikian penyitaan rumah Suwardi oleh pemerintah adalah alasan yang dicari-cari dan bertenangan dengan hukum yang dibuat sendiri oleh pemerintah kolonial. Boleh jadi, latar belakang penyitaan rumah Suwardi adalah bersifat politik yakni secara tidak langsung menghambat kegiatan Taman Siswa (Lihat juga Darsiti Soeratman, 1977:81).

Reaksi Kaum Pergerakan

Latar belakang dikeluarkannya Undang-undang Sekolah Liar terutama adalah untuk menghambat "gerak maju" Taman Siswa yang dinilai telah menanamkan benih paham kebangsaan yang dianggap membahayakan kekuasaan pemerintah kolonial. Upaya menghambat perkembangan Taman Siswa ternyata tidak hanya mengenai tokoh Taman Siswa tetapi juga mengenai sekolah partikelir (swasta) lainnya karena ordonansi tersebut berlaku umum. Oleh karena itu selain Taman Siswa, sekolah partikelir lainnya turut juga melancarkan protes.

Perjuangan menentang ordonansi tersebut dilakukan oleh Suwardi dan para pengikutnya. Taman Siswa yang seluruh sekolahnya terkena ketentuan ordonansi ini bertekad untuk mengadakan perlawanan pasif. Tekad ini dinyatakan oleh Suwardi dalam kawatnya kepada Gubernur Jendral dan juga di dalam pembicaraan lisannya dengan Kiewiet de Jonge yakni pejabat yang bertindak selaku kuasa pemerintah yang pada waktu itu berkunjung ke rumahnya (H. Aqib Suminto, 1985:62). Perlawanan Suwardi terhadap ordonansi tersebut kemudian disebarkan melalui media massa (pers), sehingga

menjadi ramai. Volksraad (Dewan Rakyat) pun akhirnya membahas masalah ini.

Ternyata perjuangan Suwardi ini mendapat simpati dan dukungan dari kaum pergerakan nasional pada umumnya yang terutama mengelola sekolah partikelir (swasta), baik dari kaum pergerakan nasional yang dalam perjuangan mereka, berasaskan Islam maupun yang berasaskan nasionalis.

Pada mulanya organisasi yang memperoleh subsidi dari pemerintah seperti Muhammadiyah menunjukkan sikap ragu dalam menghadapi ordonansi tersebut. Namun melalui konperensi daruratnya di Yogyakarta pada tanggal 18-19 November 1932, akhirnya organisasi ini pun menolak ordonansi sekolah liar. Perlawanan pun muncul dari organisasi PSII (Partai Sarekat Islam Indonesia), Permi, serta Muhammadiyah yang bekerjasama (saling bahu membahu) dengan Taman Siswa, Budi Utomo (BU), Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Kristen Indonesia (Partindo), dan Istri Sedar untuk menentang ordonansi tersebut (Lihat Aqib Suminto, 1984: 63).

Organisasi-organisasi seperti Permi menyelenggarakan rapat untuk menjelaskan kepada masyarakat ramai betapa buruk akibat yang ditimbulkan oleh ordonansi itu. Melalui konperensinya yang diadakan pada tanggal 26 sampai 27 Desember 1932, Permi memutuskan bahwa ordonansi yang dimaksud adalah melanggar dasar Islam dan dasar umum, serta cenderung membelenggu kebebasan bangsa Indonesia untuk mengatur dan membangun pendidikan menurut harapannya sendiri (Lihat juga Daliar Noer, 1982:201).

Memang di antara bulan Oktober 1932 sampai Februari 1933, diadakan rapat/konperensi yang dilakukan oleh organisasi sosial politik, baik yang kooperasi maupun yang nonkooperasi. Yang menarik adalah organisasi yang berhaluan kooperasi dan cenderung "loyal" kepada kolonial seperti Budi Utomo juga menentang ordonansi sekolah liar. Melalui konperensinya yang diadakan sekitar bulan Desember 1932, Budi Utomo memutuskan bahwa jika hingga akhir bulan Maret 1933, ordonansi tersebut tidak dicabut maka seluruh wakilnya di Volksraad dan dewan setempat akan ditarik kembali.

Protes terhadap ordonansi itu juga dilakukan oleh organisasi kedae-
rahan seperti Pasundan. Hal ini merupakan pertanda bahwa protes telah meluas. Protes tersebut telah membentuk semacam kesadaran untuk bekerjasama di kalangan organisasi politik dan nonpolitik yang semula diperkirakan tidak mungkin terjadi. Kondisi ini justru akan menjadi "bumerang" bagi pemerintah kolonial. Protes tersebut tampaknya diperhatikan oleh Gubernur Jendral de Jonge, seorang Gubernur Jendral yang mempunyai sikap keras terhadap kaum pergerakan nasional. Protes ini juga menggambarkan bahwa seluruh organisasi politik dan non politik Indonesia dapat mencapai hasil.

Protes di atas sekaligus merupakan kemenangan politik bagi kaum pergerakan nasional terhadap pemerintah kolonial. Dan lebih dari itu sekolah kebangsaan yang terutama dibentuk oleh Taman Siswa telah menanamkan ideologi nasional ke sejumlah besar pemuda. Menurut John Ingleson, hal ini merupakan kemenangan yang menentukan karena setelah terjadinya penekanan yang dilakukan oleh Gubernur Jendral de Jonge terhadap partai politik yang berhalauan nonkooperasi pada akhir tahun 1933, maka ribuan sekolah kebangsaan tetap menghidupkan dan mengembangkan ideologi nasional yang sejak semula dipertahankan oleh partai tersebut.

Setelah proklamasi kemerdekaan dan pada masa perang melawan Belanda, semangat dan cita-cita kebangsaan pada tahun 1930-an dan 1940-an itu mempunyai arti yang sangat besar dalam menjamin kelangsungan hidup republik (Lihat John Ingleson, 1983: 230).

Secara umum kaum pergerakan nasional melihat bahwa aksi menentang ordonansi sekolah liar tersebut sebagai peluang politik yang tepat untuk meningkatkan kegiatan politik dengan lebih luas sebagai sarana untuk mempercepat tercapainya tuntutan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Salah seorang mantan tokoh SI yakni Sukiman Wiryosanjoyo menilai positif aksi menentang ordonansi tersebut yang dinilainya dapat membuka mata rakyat untuk memahami hakikat politik kolonial (Abdurachman Surjomihardjo, 1986:100).

Kesimpulan

Taman siswa termasuk dalam kategori sekolah partikelir (swasta) yang mengelola bidang pendidikan secara mandiri. Pendidikan yang diterapkan mengandung asas kebangsaan.

Di dalam aktivitasnya, Taman Siswa selalu mendapat perhatian pemerintah kolonial yang mengambil sikap waspada terhadap sistem pendidikan kebangsaan yang merupakan ciri khas Taman Siswa.

Kekhawatiran pemerintah kolonial cukup beralasan mengingat penyebaran ide nasionalisme yang dilakukan oleh Taman Siswa melalui jalur pendidikan dinilai pemerintah dapat membangkitkan kesadaran rakyat sebagai kelas yang terjajah dan tertindas. Oleh karena itu, salah satu cara adalah membatasi gerak Taman Siswa dengan mengeluarkan ordonansi sekolah liar. Ternyata ordonansi itu tidak hanya mendatangkan reaksi dari Suwardi Suryaningrat saja dan pengikutnya tapi juga dari kaum pergerakan nasional. Pemerintah kolonial pun akhirnya memperhitungkan bahwa terus dilaksanakannya ordonansi tersebut akan menyebabkan situasi politik terus memanas

karena protes dari kaum pergerakan nasional. Oleh karena itu pemerintah kolonial pun membatalkan ordonansi itu pada tanggal 13 Februari 1933.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Taufik, 1971. *Schools and Politics: The Kaum Muda Movement in West Sumatera (1927-1935)*. Ithaca, New York: Cornell University.
- Daeng Materu, M. Sidky. 1985. *Sejarah Pergerakan Nasional Bangsa Indonesia*. Jakarta: PT. Gunung Agung.
- Dewantara, B.S. 1979. *Nyi Hajar Dewantara*. Jakarta: PT. Gunung Agung.
- Ingleson, John. 1983. *Jalan Ke Pengasingan: Pergerakan Nasionalis Indonesia Tahun 1927-1942*. Jakarta LP3ES.
- McKahin, George. 1980. *Nasionalisme dan Revolusi Di Indonesia*. terj. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Kartodirjo, Sartono, Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notokusanto, 1976. *Sejarah Nasional Indonesia*. Jakarta: Departemen P dan K.
- Kennedy, R. 1947 "Colonial Crisis and the Future", di dalam buku Ralph Linton, *The Science of Man in the World Crisis*. New York: Columbia University Press.
- Noer, Deliar. 1982. *Gerakan Modern Islam Di Indonesia 1900-1942*. Jakarta: LP3ES.
- Pahlawan Kemerdekaan Nasional Jilid I*. 1967. Jakarta: Departemen Penerangan.
- Soeharto, Pitut dan Zainoel Ihsan. 1982. *Belenggu Ganas*. Jakarta: Aksara Jayasakti.

Soeratman, Darsiti. 1977. *Ki Hajar Dewantara*. Jakarta: Departemen P dan K.

Suminto, Aqib. 1985. *Politik Islam Hindia Belanda*. Jakarta: LP3ES.

Surjomihardjo, Abdurrahman, 1986. *Ki Hadjardewantara dan Taman Siswa Dalam Sejarah Indonesia Modern*. Jakarta: Sinar Harapan.

Van Niel, Robert. 1984. *Munculnya Elit Modern Indonesia*. terj., Jakarta: Pustaka Jaya.

Pengarang

DWI PURWOKO adalah staf pengajar di Taman Siswa.